

**KEPATUHAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM
PENJUALAN UNTUK PENGUSAHA KENA PAJAK
(PKP) PADA CV. BIMA GUNAWAN TEXTILE**



LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Program Studi Strata Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh:

RIZKA UMMU FADHILLAH

20220071

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

KEPATUHAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM PENJUALAN UNTUK PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA CV. BIMA GUNAWAN TEXTILE

Disusun oleh:

Rizka Ummu Fadhillah

20220071

Telah disetujui dan disahkan dengan baik oleh Pembimbing Laporan Kuliah Kerja Usaha, guna melengkapi persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir Program Studi Akuntansi

Surakarta, 31 Maret 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Kepala



ARIF FARIDA. S.E., M.Ak.

NIDN : 0612039205

Program Studi Akuntansi



ASTUNING SAHARSINI, S.E., M.Acc.

NIDN : 0606129102

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan melakukan penulisan laporan dengan sebaik-baiknya. Laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU) ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek Kuliah Kerja Usaha (KKU) pada CV. Bima Gunawan Textile. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran merupakan bukti nyata pelaksanaan Kuliah Kerja Usaha (KKU) yang telah penulis laksanakan dalam lingkup perusahaan.

Laporan disusun untuk melengkapi persyaratan mengikuti mata kuliah Kuliah Kerja Usaha pada Semester Genap. Laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU) mahasiswa Program Studi Akuntansi pada CV. Bima Gunawan Textile dibuat dengan tujuan untuk mahasiswa dapat melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kerja.

Dengan selesainya penulisan laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU), penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Arif Farida S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan kepada penulis dalam menyusun laporan ini
2. Ibu Bennia Okmawati, selaku *Accounting Manager* CV. Bima Gunawan Textile sekaligus pembimbing KKU
3. Bapak Ir. Tjahyo Gunawan, selaku *Owner* CV. Bima Gunawan Textile
4. Bapak Aditya Santoso Gunawan S.E. *Direktur* CV. Bima Gunawan Textile
5. Karyawan dan karyawan CV. Bima Gunawan Textile yang memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan KKU
6. Tak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik itu untuk pelaksanaan maupun dalam penyelesaian laporan

Kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU), semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU) dapat bermanfaat bagi rekan – rekan mahasiswa/i dan pembaca sekaligus demi menambah pengetahuan tentang Kuliah Kerja Usaha (KKU).

Surakarta, 31 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN KULIAH KERJA USAHA	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
LAPORAN KULIAH KERJA USAHA	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Divisi Kerja dan Kegiatan	3
3. Pokok Masalah	8
4. Pembahasan	11
5. Kesimpulan dan Saran	14
DAFTAR PUSTAKA.....	17
<u>LAMPIRAN</u>	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Aktivitas Mahasiswa (*logbook*)

Lampiran 2. Presensi Kehadiran Mahasiswa

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Kuliah Kerja Usaha

LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

1. Latar Belakang Masalah

CV. Bima Gunawan Textile merupakan perusahaan perdagangan textile dan bahan batik yang menyediakan berbagai jenis kain, perlengkapan, peralatan membatik dan Eco-print dengan customer seluruh Indonesia pemasaran yang dijangkaunya.

Awal mula CV. Bima Gunawan Textile berbentuk Usaha Dagang (UD) dengan nama UD Bima Kunting. Beberapa tahun beroperasi dan telah memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) Perusahaan mendaftarkan usahanya pada kantor pajak sebagai CV. Bima Gunawan Textile.

Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP oleh DJP, CV. Bima Gunawan Textile berkewajiban sebagai Wajib Pajak Badan melaksanakan ketentuan pajak dengan semestinya, seperti melakukan transaksi jual-beli secara berfaktur pada customer maupun supplier dan melaporkan kewajiban penjualan dan pembelian kepada DJP dengan melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun kewajiban pajak setiap bulan dan tahunannya.

Pelaksanaan kewajiban PKP CV. Bima Gunawan Textile memiliki beberapa masalah yang dihadapi, antara lain : melakukan transaksi penjualan yang dikenakan faktur untuk customer, ini sebagai masalah didasarkan pada Undang – Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai PKP suatu badan diwajibkan untuk memungut PPN atau PPNBM yang terutang. Sedangkan, pihak customer terbiasa dengan penjualan UD Bima Kunting sebelumnya dengan transaksi tanpa mengeluarkan faktur penjualan untuk mereka

Transaksi retur penjualan yang dilakukan customer atas nota pembelian mereka dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan setelah faktur penjualan diterbitkan, untuk itu mewajibkan adanya perubahan atau revisi faktur penjualan dan melakukan pelaporan pembetulan PPN. Dalam melakukan revisi faktur penjualan di e-faktur memiliki maksimal batas upload faktur tanggal 15 bulan berikutnya,

transaksi retur yang dilakukan customer menjadi masalah pada ketentuan pajak
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Bima Gunawan Textile.

2. Divisi Kerja dan Kegiatan

Kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Maret 2023, dengan mengikuti hari dan jam kerja perusahaan yaitu 6 hari kerja dalam seminggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.30 – 16.30 WIB.

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) penulis langsung ditempatkan sebagai staff pajak dan team purchasing perusahaan, selanjutnya diberikan pengarahan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditanggung jawabkan pada posisi yang ditempati. Selain itu diperkenankan membaca seluruh tata tertib yang harus dipatuhi selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) di CV. Bima Gunawan Textile.

Staff pajak perusahaan memiliki peran sebagai pelaksana yang melakukan kewajiban pajak suatu perusahaan berjalan dengan teratur sebagai wajib pajak yang benar dan tertib. Dengan melaksanakan kewajiban pajak untuk membayar dan melaporkan kegiatan usaha pada DJP sesuai undang-undang yang berlaku tanpa melanggar peraturan pajak yang dikenakan untuk perusahaan baik jangka waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Staff pajak di perusahaan bekerja secara individual dalam melaksanakan pekerjaan dan efisiensi kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan CV. Bima Gunawan Textile. Selain itu usaha ini merupakan usaha keluarga dengan owner dan direktur perusahaan memiliki status keluarga, dan memiliki kewajiban pajak sebagai wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha UMKM sehingga selain menghitung pajak perusahaan, penulis bertugas menghitung pajak owner dan direktur.

Dalam team purchasing memiliki peranan sebagai pengendali dan monitor stok persediaan barang dagangan terkendali untuk operasional transaksi jual-beli kepada customer. Team purchasing mengajukan persetujuan permintaan barang yang akan dibeli ke atasan dengan membuat surat Pre-Order sesuai format dan prosedur perusahaan yang berlaku.

Pelaksanaan KKU dilaksanakan dengan penempatan di CV. Bima Gunawan Textile sebagai staff pajak dan team purchasing. Dengan pekerjaan yang dilakukan antara lain:

1. Pembuatan faktur penjualan perusahaan, menghitung, membayar dan melaporkan PPN
2. Mengatur perhitungan pembayaran dan pengajuan PPH Pasal 25 Badan dan PPH Final UMKM untuk pajak orang pribadi owner dan direktur
3. Membuat bukti potong, mengajukan pembayaran dan melaporkan PPH Pasal 23 jasa Maklon perusahaan
4. Membuat nota gunggungan pajak
5. Memantau dan cek stok hingga melakukan permintaan barang ke gudang serta menginput barang datang
6. Membuat surat Pre-Order untuk pemesanan barang ke supplier
7. Melakukan pengarsipan berkas pajak dan surat Pre-Order

Tugas yang dilakukan penulis selama pelaksanaan KKU terkait dengan alur proses kewajiban pajak CV. Bima Gunawan Textile, yaitu PPH Pasal 25 Badan, PPH Final UMKM, PPH Pasal 23 Jasa Maklon dan PPN CV. Bima Gunawan Textile seperti membuat bukti potong, faktur keluaran, upload faktur masukan, e-Billing, surat Pre-Order dan permintaan nomor efaktur (enofa).

Pelaksanaan KKU ini dikoordinir oleh Ibu Bennia selaku Accounting Manager CV. Bima Gunawan Textile dan sebagai pembimbing lapangan. Dalam penyelesaian tugas, pembimbing lapangan mengkoordinir setiap tugas yang harus dikerjakan dan tentunya dengan kerja sama yang terjalin. Pada dasarnya tugas staff pajak di CV. Bima Gunawan Textile adalah sebagai pelaksana wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak pada perusahaan dengan benar dan tertib.

Rincian pekerjaan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU), sebagai berikut:

1. Pembuatan faktur penjualan perusahaan, menghitung, membayar dan melaporkan PPN

Status PKP dalam perusahaan mewajibkan melakukan pemungutan dan melaporkan PPN dengan penjualan membuat faktur keluaran / faktur penjualan untuk customer pada aplikasi e-faktur 3.2 pada Menu Faktur Keluaran dalam pembuatnya disesuaikan dengan data customer bahwa apakah mereka bendaharawan atau tidak untuk memilih kategori jenis faktur berlaku, isikan data lengkap profil pembeli, nama barang, harga per item dan jumlah barang yang dibeli akan otomatis DPP dan PPN terisi sesuai peraturan bahwa DPP adalah nilai Dasar Pengenaan Pajak, PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% dari jumlah nominal transaksi.

Menghitung, membayar dan melaporkan PPN dengan rincian pengerjaan, sebagai berikut :

- a. Telah menginput seluruh transaksi penjualan berfaktur untuk masa PPN yang akan dilaporkan
- b. Memastikan dan upload faktur masukan / faktur pembelian sesuai nominal pembelian yang dilakukan perusahaan, karena beberapa kasus yang ditemui adanya perilaku curang oleh supplier mengubah nominal DPP dan PPN tidak sesuai pembelian yang dilakukan oleh CV. Bima Gunawan Textile, untuk itu selalu dilakukan cross check ulang faktur pembelian dengan bagian team accounting dan purchasing bahwa apakah benar nominal pembelian kepada supplier dengan rincian barang tersebut telah sesuai.
- c. Mengumpulkan dan menjumlah data penjualan kategori gunggung. Gunggung adalah penjualan yang dilakukan dengan tanpa mengeluarkan faktur, biasanya penjualan dengan nominal yang rendah dan kepada customer pengecer.
- d. Melakukan perhitungan untuk mencari Kurang Bayar PPN dengan rumus Faktur Penjualan dikurangi Faktur Masukan, maka ketemu nominal Kurang Bayar PPN yang selanjutnya perhitungan ini akan diajukan pada direktur untuk disetujui
- e. Perhitungan Kurang Bayar PPN telah disetujui, selanjutnya dibuatkan e-Billing pada laman <https://djponline.pajak.go.id> masuk pada DJP

CV.BIMA GUNAWAN TEXTILE NPWP dan password DJP perusahaan sebagai alat pembayaran ke bank

- f. Setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan Nomor NTPN dan akan dilampirkan dalam bentuk PDF sebagai bukti bayar untuk konfirmasi pada SPT Masa PPN telah dilakukan pembayaran sesuai nominal kurang bayar
- g. Penyampaian SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik. Pelaporan dilakukan secara online pada laman <https://web-efaktur.pajak.go.id>, setelah berhasil lapor PPN unduh dan cetak BEP dan induk SPT Masa PPN sebagai arsip perusahaan bahwa telah dilakukan kewajiban perusahaan melaporkan penjualan dan pembelian atas usahanya. Batas waktu pelaporan PPN pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

- 2. Mengatur perhitungan pembayaran dan pengajuan PPH Pasal 25 Badan dan PPH Final UMKM untuk pajak orang pribadi owner dan direktur

PPH Pasal 25 Badan merupakan kewajiban yang dibebankan untuk suatu badan dalam setahun, yang dapat diangsur setiap bulannya dengan membayar PPH Pasal 25 Badan ini. Pembayaran PPH Pasal 25 Badan untuk setiap bulan nominal akan tetap sama, perubahan nominal pajak PPH Pasal 25 Badan adalah setelah melaporkan SPT Tahunan.

Owner dan direktur perusahaan ini memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak atas omset penjualan yang dilakukan setiap bulan, pada kewajibannya membayar PPH Final UMKM dengan tarif 5% dari omset transaksi penjualan yang mereka lakukan sendiri.

- 3. Membuat bukti potong, mengajukan pembayaran dan melaporkan PPH Pasal 23 jasa Maklon perusahaan

Dalam operasional perusahaan melakukan jasa maklon pada beberapa perusahaan lainnya. Pada kewajiban perpajakan untuk PPH Pasal 23 Jasa Maklon pemungut/pemotong dan pelaporan untuk jasa dilakukan oleh customer, dengan contoh CV. Bima Gunawan Textile melakukan jasa maklon pada PT. Primatex, maka CV. Bima Gunawan Textile melakukan

pemotongan pajak 2% jasa maklon dengan membuat bukti potong unifikasi sebagai bukti pemotongan untuk PT. Primatex dan membayarkan ke negara 2%, serta lapor PPH Pasal 23 pada <https://djponline.pajak.go.id>

4. Membuat nota gunggung pajak

Untuk transaksi penjualan secara gunggung pada perusahaan memiliki sistem khusus untuk merekam seluruh transaksi penjualan gunggung untuk penjualan yang akan dilaporkan pada lapor PPN setiap bulannya. Nota gunggung wajib dilakukan pencetakan secara hardfile sebagai bukti bahwa memang adanya penjualan secara gunggung yang dilakukan perusahaan untuk pendukung pemeriksaan ketaatan pajak

5. Memantau dan cek stok hingga melakukan permintaan barang ke gudang, serta menginput barang datang

Pemantauan dan permintaan barang dilakukan penulis setiap pagi hari dengan mengecek dari sistem kartu stok untuk mengetahui stok barang apakah jenis barang yang menipis bahkan telah habis pada gudang toko, selanjutnya melakukan permintaan pada gudang utama perusahaan. Penginputan seluruh barang datang pada gudang toko untuk di entry pada program dilakukan oleh team purchasing.

6. Membuat surat Pre-Order untuk pemesanan barang ke supplier

Jika stok barang gudang telah habis maka bagian gudang utama akan memberikan informasi pada bagian team purchasing untuk melakukan pembelian dengan membuat surat Pre-Order untuk supplier perusahaan

7. Melakukan pengarsipan berkas pajak dan surat Pre-Order

Pengarsipan merupakan suatu tugas terakhir untuk semua staff untuk melakukan pengarsipan data atas pekerjaan yang telah dilakukan, pada pengarsipan biasanya dilakukan pada akhir bulan.

3. Pokok Masalah

Setiap mahasiswa Kuliah Kerja Usaha (KKU) tentu memiliki masalah masing-masing yang mereka hadapi, pada penempatan Staff Pajak CV. Bima Gunawan Textile mendapati masalah yang dihadapi, yaitu:

1. Penjualan yang dikenakan atau dibuatkan faktur penjualan oleh perusahaan mendapati kendala pada customer tidak berkenan memberikan identitas diri atas NPWP dan NIK sebagai isian data profil pada faktur.

Ditarik dari data customer ternyata customer perusahaan adalah para pelaku usaha secara pribadi dengan usia lanjut sehingga dalam pemahaman peraturan dan update undang-undang perpajakan masih minim informasi tentang Faktur Keluaran dan Faktur Masukan atas jual-beli, dengan status perusahaan yang telah PKP harus melakukan kewajiban memungut PPN. Mereka memiliki mindset rasa ketakutan terlebih dahulu dengan kata-kata nota berfaktur yang akan diberikan atas pembelian di perusahaan ini. Pada konsepnya pembayaran pajak customer atas kewajiban pajak mereka besar-kecilnya dipengaruhi dari omset penjualan mereka, bukan dari nilai pembelian berfaktur dari supplier. Transaksi pembelian jika mendapatkan faktur untuk arsip pendukung customer jika ada pemeriksaan pajak yang dilakukan KPP oleh mereka.

CV. Bima Gunawan Textile pada pelaporan PPN dalam transaksi penjualan yaitu penjualan berfaktur dan penjualan secara gunggung. Dalam UU tentang NIK berlaku sebagai NPWP, hal ini tidak ada lagi penghalang sebagai alasan untuk melakukan transaksi penjualan berfaktur untuk tidak membuatkan customernya faktur atas transaksi pembelian mereka pada perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga jika customer dengan terus menerus tidak berkenan memberikan data diri KTP sebagai profil pembuatan faktur, dampaknya CV. Bima Gunawan Textile akan mengisikan penjualan gunggung yang tinggi. Seiringnya waktu nilai penjualan gunggung yang tinggi akan menimbulkan kecurigaan KPP atas transaksi jual-beli pada perusahaan ini.

2. Transaksi atas retur penjualan dari customer yang dilakukan dalam tempo bebas.

Dalam kasus transaksi retur dianggap sebagai suatu masalah untuk bagian yang menyangkut pada pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini dimulai dari :

- a. Nota transaksi penjualan yang telah dibuatkan faktur pada efaktur saat terjadinya awal penjualan telah di upload dalam sistem efaktur
- b. Waktu yang dilakukan customer untuk melakukan retur tidak dapat dipastikan kapan karena dalam SOP Penjualan perusahaan tidak adanya batas maksimal untuk melakukan retur yang dapat dilakukan customer kepada toko. Mengingat dalam peraturan yang ada melakukan revisi faktur dan pembatalan faktur hanya dapat dilakukan maksimal batas terakhir tanggal 15 bulan berikutnya untuk masa faktur yang dilaporkan
- c. Atas faktur penjualan yang dilakukan telah dibayarkan dan dilaporkan PPN pada masanya, jika akan melakukan revisi faktur atau pembatalan faktur maka otomatis akan revisi pembayaran hingga melakukan pembetulan laporan PPN, sedangkan CV. Bima Gunawan Textile menghindari dari revisi pembayaran dan pelaporan guna menjaga kepatuhannya pada ketaatan perpajakan pada sistem.

Dalam kasus yang pernah terjadi retur penjualan pihak customer melakukan retur dalam jangka waktu terhitung dari nota penjualan adalah 4 bulan. Dengan contoh : Transaksi penjualan pada tanggal 9 Oktober 2022 dan retur yang diajukan tanggal 5 Februari 2023, dalam menghadapi permasalahan perusahaan menggunakan solusi dengan memotongkan nota penjualan yang akan datang atas retur yang diajukan customer tersebut. Atas pemotongan nota upaya perusahaan untuk tidak melakukan revisi faktur, pembayaran dan pelaporan pembetulan PPN. Jika tanpa adanya evaluasi yang mendalam untuk mendapatkan peraturan yang baik untuk pihak customer dan baik untuk sistem pengamanan perpajakan perusahaan, maka solusi seperti itu akan menimbulkan permasalahan baru untuk perusahaan

kedepannya, saat adanya pemeriksaan pajak dilakukan olah data adanya ketidaksinkronan data pembelian pihak customer dengan data faktur penjualan yang dilaporkan PPN pada DJP perusahaan.

Sehingga penulis memberikan solusi sesuai ketentuan perpajakan yang lebih aman untuk perpajakan perusahaan, yaitu dengan:

- a. Perusahaan membuat dan menerapkan SOP Penjualan tentang Retur Penjualan yang memiliki batas maksimal dan ketentuan barang yang dapat diklaimkan sebagai transaksi retur, dengan ini pihak customer akan melakukan retur barang dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga apabila akan melakukan perubahan dan revisi faktur waktu untuk upload masih dapat diakses
- b. Jika memang adanya transaksi retur yang diajukan customer pada perusahaan, memang mengharuskan melakukan revisi yang sebelumnya sudah dibuatkan faktur penjualan, agar transaksi jual-beli nominal sinkron antara nota dan faktur yang dilaporkan pada pajak
- c. Dalam ketentuan perusahaan untuk tidak melakukan revisi faktur, revisi pembayaran hingga melakukan pembetulan laporan PPN atas transaksi retur penjualan pada perusahaan, lebih baiknya melakukan revisi dan pembetulan untuk menghindari kecurigaan dan mendapatkan surat pemeriksaan KPP atas usaha yang dijalani

4. Pembahasan

Dalam perusahaan yang sudah ditetapkan dengan ketentuan pajak sebagai PKP, CV. Bima Gunawan Textile melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN. Salah satu kewajiban bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) adalah melakukan pemungutan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. Pemungutan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkannya pada SPT Masa PPN.

Dalam pelaksanaan kewajiban PKP CV. Bima Gunawan Textile memiliki beberapa masalah yang dihadapi, yaitu :

1. Sulit dalam mendapatkan identitas customer untuk data profil saat pembuatan faktur penjualan. Berdasarkan Ketentuan PMK 18/PMK.03/2021 Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. PKP harus menerbitkan faktur pajak dengan benar, lengkap dan jelas. Salah satunya dalam informasi identitas pembeli yang sulit didapatkan dari NPWP atau NIK sebagai kelengkapan, namun pihak pembeli enggan memberikan. Pada ketentuan terbaru pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi WP OP diharapkan dapat mempermudah administrasi Wajib Pajak, khususnya dalam pembuatan faktur penjualan yang dilakukan PKP, sehingga WP OP tidak perlu melakukan pendaftaran ke KPP, jika tidak memiliki NPWP karena NIK berlaku sebagai pemadaan NPWP (Pasal 2 UU HPP).

Dalam menghadapi masalah ini sering kali ditemui alasan yang diajukan pembeli untuk meminta bahwa pembeliannya tidak perlu dibuatkan faktur pembelian atas ketakutan pemikiran mereka bahwa jika mendapatkan faktur pembelian akan membuat pembayaran pajak mereka tinggi dan akan terjerat masalah pajak yang lain atas pembelian ini. Dalam faktanya tinggi rendahnya pembayaran pajak yang wajib dilakukan oleh WP atas nilai omset penjualan, bukan dari nominal faktur pembelian yang mereka beli pada perusahaan yang sudah PKP. Wajib pajak yang melakukan penjualan dibawah omset 4,8 M dalam setahun berkewajiban membayar

pajak berupa PPH Final UMKM dengan rumus 0,5% dari omset penjualan mereka lakukan.

Dengan masalah sulitnya perusahaan mendapatkan data identitas NPWP dan NIK dalam pembuatan faktur penjualan dengan alasan yang diterima perusahaan dari customer, maka penulis memberikan solusi dari permasalahan ini dengan CV. Bima Gunawan Textile, yaitu :

- a. Dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwasanya perusahaan sudah ditetapkan sebagai PKP dengan mengharuskan perusahaan melakukan pemungutan PPN dengan menerbitkan faktur pajak untuk customer dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. Dengan ini kesadaran dan pengetahuan informasi tentang perpajakan dalam kalangan usaha UMKM masih minim dan kurang, maka dapat bekerja sama memohon kepada pihak DJP melalui KPP dapat memberikan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang mendasar untuk bekal pengusaha UMKM, contoh umumnya peraturan terbaru mengenai pemadaan NIK sebagai NPWP dapat dimengerti oleh semua kalangan untuk tidak ada alasan melakukan ketaatan penegakan peraturan pajak.
 - b. Perusahaan membuat database atau program perekam data customer untuk mempermudah staff saat membuat faktur penjualan untuk kedepannya dengan customer yang telah memberikan data NPWP atau NIK, sehingga saat melakukan transaksi tidak kembali meminta data diri NIK atau KTP pihak customer.
2. Transaksi retur penjualan yang diajukan customer dengan dilakukan dalam waktu pengembalian barang yang tidak ada batas maksimal retur, dengan ini mempengaruhi terhadap pembayaran dan pelaporan PPN dalam CV. Bima Gunawan Textile, maka akan melakukan revisi faktur penjualan yang telah dibuatkan sebelumnya dengan pembatasan upload faktur maksimal tanggal 15 bulan berikutnya yang telah ditentukan DJP, dengan ini penulis memberikan solusi yang dapat diterapkan perusahaan, yaitu :

- a. Perusahaan memberikan ketentuan dan peraturan mengenai transaksi retur penjualan mengenai jangka waktu dan ketentuan pengembalian retur barang yang dapat diajukan customer
- b. Melakukan revisi faktur sesuai saat terjadi transaksi retur penjualan, sesuai peraturan masa faktur dapat diakui 3 bulan berikutnya setelah transaksi masa faktur, sehingga jika perusahaan telah membayar dan melakukan lapor PPN Masa, setelahnya terdapat transaksi retur barang penjualan maka tetap dapat melakukan revisi faktur dengan melakukan pelaporan PPN nya pada masa bulan berikutnya

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) merupakan kegiatan yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh mahasiswa yang diberikan oleh pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta untuk memperkenalkan mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja khususnya yang berkaitan dengan divisi pajak. Kegiatan KKU mendorong para mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang dimiliki, yaitu berkenaan dengan bidang akuntansi ke dalam dunia kerja nyata sehingga mereka siap untuk terjun dalam dunia kerja setelah lulus dari menempuh pendidikan strata 1.

Mahasiswa melaksanakan program Kuliah Kerja Usaha (KKU) di CV. Bima Gunawan Textile penempatan sebagai staff pajak dan team purchasing selama 2 Bulan. Selama melaksanakan kegiatan, penulis memperoleh pengetahuan yang luas khususnya pada ilmu pajak dan alur pembelian pada dunia kerja yang dihadapi sebagai staff pajak dan sebagai team purchasing suatu perusahaan terkhusus usaha textile.

Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU), penulis dibimbing dan diberikan pengarahan oleh para staff, khususnya pada staff accounting sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Dibutuhkan kehati-hatian dan teliti yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan, agar hasil yang diperoleh maksimal, serta akurat.

Dalam keadaan dilapangan dalam penjualan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai PKP disandingkan dengan ilmu yang diterima dan secara ketentuan ternyata pada CV.Bima Gunawan Textile tidak semua ilmu dan ketentuan perpajakan dapat diterapkan secara sempurna dan berpatok Undang-Undang dengan ini perusahaan menjalankan usaha dengan mengambil jalan tengah antara tidak menyimpang Undang-Undang dan customer tidak diberatkan / di rumitkan dengan ketentuan pajak yang harus dijalankan perusahaan, dengan ini :

1. Transaksi penjualan yang dibuatkan faktur penjualan oleh perusahaan untuk customer, dalam bagian data profil dapat diisikan NIK sebagai kelengkapan, saat customer tidak memiliki NPWP. Dalam ketentuan

peraturan terbaru NIK dapat sebagai data sepadan dengan NPWP memudahkan customer dalam bertransaksi. Lain sisi untuk customer yang enggan dalam proses pembelian pada perusahaan tidak berkenan dibuatkan faktur atas dasar mereka takut dengan pembayaran pajak mereka akan tinggi, ini dapat dilakukan pihak staff pajak dan bagian kasir memberikan penjelasan bahwa CV. Bima Gunawan Textile telah terdaftar sebagai PKP dengan transaksi penjualan dapat membuat faktur penjualan untuk customer dan memberikan pemahaman bahwasanya faktur penjualan sebagai pembelian mereka tidak mempengaruhi pembayaran pajak seperti PPH Final UMKM dikenakan pada 0,5% pada transaksi penjualan yang dilakukan customer, melainkan bukan dari transaksi pembelian.

2. Transaksi retur penjualan yang diajukan customer dengan waktu tidak dapat ditentukan perusahaan, dengan artian customer bebas dapat melakukan retur. Dengan ini penulis memberikan solusi yang dapat diterapkan perusahaan dengan dimulai dibentuknya peraturan penjualan terutama pada transaksi retur penjualan yang sama-sama disetujui dengan customer untuk menjaga relasi baik antar supplier dan customer. Peraturan jangka waktu retur maksimal dapat diajukan pihak customer 1 bulan dari transaksi penjualan terhitung dari tanggal pada nota penjualan. Dimulai dari berlakunya ketentuan maksimal retur dapat membuat pihak customer tertib dalam pengajuan retur penjualan kepada perusahaan. Dan memberikan pemahaman pada customer bahwa retur penjualan yang diajukan mempengaruhi pada nominal DPP dan PPN penjualan yang telah dilaporkan pada PPN Bulan terjadinya transaksi retur tersebut, perusahaan dapat membuat perhitungan lebih bayar dan dengan ini mengharuskan melakukan pembetulan lapor PPN Bulan yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai hasil Kuliah Kerja Usaha dan pembahasan, maka penulis mencoba memberikan saran serta masukan, untuk Perusahaan CV. BIMA GUNAWAN TEXTILE diharapkan sebagai perusahaan yang sedang berkembang ini dengan terus meningkatkan pembaruan dan pembentukan Standar Operasional Perusahaan (SOP) guna untuk perusahaan lebih baik dalam berkembang dan maju, terutama mengenai peraturan yang membahas berkas data diri untuk calon customer sebagai pendataan yang jelas untuk profil sebagai pembeli dan transaksi retur penjualan yang dapat diajukan oleh customer. Perusahaan yang telah berstatus PKP dapat saling memberikan pemahaman bahwa perusahaan ini telah berubah dari UD menjadi CV dan berstatus PKP yang diharuskan melakukan kewajiban pemungutan PPN dan melaksanakan peraturan lainnya sebagai semestinya, seperti melakukan pembuatan faktur penjualan untuk customernya dengan isian yang benar tanpa adanya manipulasi data diri pembeli dan melayani transaksi retur sesuai ketentuan perpajakan dalam tata cara pengisian faktur revisi / faktur pengganti.

Demikianlah saran-saran yang dapat disampaikan, setelah melaksanakan Kuliah Kerja Kuliah Kerja Usaha (KKU) di CV. Bima Gunawan Textile. Semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan dan pihak Universitas.

DAFTAR PUSTAKA

STIE Surakarta. 2023. Pedoman Kuliah Kerja Usaha. Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Undang – Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

<https://djponline.pajak.go.id>

Lampiran 1. Data Aktivitas Mahasiswa (*logbook*)

Logbook Mahasiswa KKU

Nama : Rizka Ummu Fadhillah
NIM : 20220071
Program Studi : Akuntansi
Judul : **KEPATUHAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM PENJUALAN
UNTUK PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA CV. BIMA
GUNAWAN TEXTILE**

No.	Tanggal	Kegiatan
1	01 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Lapor PPH Pasal 23 masa Januari 2023 (jasa maklon) Rekap spt dan bupot PPH Pasal 23 masa Januari 2023 (jasa maklon) Kirim BUPOT ke supplier Input barang datang kain Rekap penjualan Januari 2023 untuk data pembuatan faktur Januari 2023
2	02 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Penerimaan dan rekap berkas faktur masukan masa Januari 2023 Pengajuan data penjualan untuk dibuatkan faktur keluaran masa Januari 2023 kepada atasan Pembuatan faktur keluaran masa Januari 2023 Penerimaan berkas faktur masukan masa Januari 2023
3	03 Februari 2023	Input dan arsip faktur masukan masa Januari 2023 Upload dan input arsip faktur masa Januari badan dan OP 2023

		Stock Opname Persediaan Pembuatan faktur keluaran
4	04 Februari 2023	Stock Opname Persediaan
5	06 Februari 2023	Input program Stock Opname Persediaan Update harta untuk data SPT Tahunan Orang Pribadi Cetak nota untuk gunggung PPN masa Januari 2023 Cek barang datang sutra Pembuatan surat pre-order barang
6	07 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Melakukan perhitungan untuk pembayaran PPH Final Orang Pribadi (PP46) Cetak nota untuk gunggung PPN masa Januari 2023 Sortir data penjualan faktur untuk masa Februari 2023 tgl 1 & 2 Input barang datang kain dan obat batik
7	08 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pengajuan perhitungan PPH Final UMKM untuk OP ke atasan Pembuatan billing PPH final op dan PPH Pasal 25 badan masa Januari 2023 Penerimaan berkas faktur masukan masa Januari 2023 Terima dan cocokan mutasi rekening giro dengan pembayaran transaksi Terima bukti setor bank untuk pembayaran PPH Pasal 23 jasa maklon bulan Februari 2023
8	09 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pembuatan surat pre-order barang Cetak nota untuk gunggung PPN masa Januari 2023

		Penerimaan berkas faktur masukan masa Januari 2023 Cek faktur masukan masa Januari pada prepopulated pada apk efaktur
9	10 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Input dan arsip faktur masukan masa Januari Input rekap dan arsip bukti bayar PPH 25 badan dan PPH Final OP Revisi input barang pada program Cetak laporan barang masuk, barang keluar dan kartu stock
10	11 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Cek dan hitung barang datang atas PO kompor Cetak nota untuk gunggungan PPN masa Januari 2023
11	13 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pembuatan surat pre-order barang (sutra 54 dan kompor listrik biasa) Cetak nota untuk gunggungan PPN masa Januari 2023 Penerimaan berkas faktur masukan masa Februari 2023 Isi formulir penghapusan npwp ganda Arsip berkas pajak
12	14 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pengajuan penghapusan npWP OP ke KPP Pratama Surakarta Validasi NIK NPWP OP pada djp.online Input barang datang kain
13	15 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Input barang datang kain
14	16 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang

		Pencocokan nota dengan faktur penjualan Penerimaan berkas faktur masukan masa Februari 2023
15	17 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Input faktur penjualan / PK masa Februari 2023 Penerimaan berkas faktur masukan masa Februari 2023
16	18 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Arsip berkas faktur masukan dan keluaran masa Januari 2023
17	20 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Melakukan perhitungan PPN masa Januari 2023 Cetak nota gunggungan masa Februari 2023
18	21 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pengajuan hitungan PPN Januari ke atasan Pembuatan E-billing dan SPT masa web efaktur masa Januari 2023 Cek barang datang kompor dan indigo pasta Pembuatan PO Sutra Pembuatan faktur penjualan masa Februari 2023
19	22 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Input faktur penjualam Februari 2023 Cetak nota gunggungan masa Februari 2023 Pembayaran PPN masa Januari 2023
20	23 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Lapor PPN Januari 2023 Input dan arsip file PPN Cetak nota gunggungan Terima berkas faktur masukan Januari dan Februari

21	24 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pembuatan faktur Februari Input dan arsip faktur masukan masa Januari dan Februari
22	25 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Cetak nota gunggungan Februari 2023 Input barang datang ke program (kain)
23	27 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Cetak nota gunggungan Februari 2023 Input barang datang ke program (kain) Arsip packinglist kain datang
24	28 Februari 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Cetak nota gunggungan Februari 2023 Input barang datang ke program (kain) Arsip packinglist kain datang
25	01 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Terima berkas dan arsip faktur masukan Februari Kirim faktur penjualan ke customer
26	02 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Terima berkas dan arsip faktur masukan Februari Input barang datang kain ke program Pembuatan dan arsip faktur penjualan Februari
27	03 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Terima berkas dan arsip faktur masukan Februari Input barang datang kain ke program Cocokan nota dengan faktur penjualan

		Pengajuan bayar PPH Pasal 23 Jasa Maklon masa Februari 2023 ke direktur
28	03 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pembuatan faktur penjualan Maret 2023 Cocokan nota dengan faktur penjualan Arsip faktur penjualan Maret
29	04 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pembuatan faktur penjualan Maret 2023 Cocokan nota dengan faktur penjualan
30	06 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pembuatan faktur penjualan Maret 2023 Buat surat pre-order barang Input barang datang kain ke program
31	07 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Terima bukti bayar PPH Pasal 23 jasa maklon Lapor PPH Pasal 23 Kirim ke supplier bukti potong PPH Pasal 23 Arsip berkas PPH Pasal 23 Terima berkas dan arsip faktur masukan Februari
32	08 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Terima berkas dan arsip faktur masukan Februari Menyusun taxplan persiapan tahun 2023 untuk pembayaran PPH final WP OP Pengajuan perhitungan PPH final WP OP Pembuatan E-billing PPH final & PPH 25 badan
33	09 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang

		Membuat bukti potong PPH Pasal 23 bulan Maret Input barang datang kain ke program Terima berkas dan arsip faktur masukan Februari
34	10 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Input rekap dan arsip bukti bayar PPH Pasal 25 Badan & PPH Final UMKM WP OP Membuat faktur penjualan tanggal 10 a.n PT Harapan Membuat bukti potong PPH Pasal 23 bulan Maret Cocokan data kertas kerja spt tahunan WP OP dari konsultan
35	11 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Membuat bukti potong PPH Pasal 23 bulan Maret Cocokan data kertas kerja spt tahunan WP OP dari konsultan
36	13 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Membuat faktur penjualan Maret Cocokan data kertas kerja spt tahunan WP OP dari konsultan Pengajuan spt tahunan pada direktur
37	14 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Membuat faktur penjualan Maret Input barang datang kain ke program Terima berkas dan arsip faktur masukan Februari
38	15 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Input barang datang kain ke program Membatalkan faktur pada efaktur atas transaksi nota batal Cetak packinglist kain sritex Arsip berkas packing tanggal 14 & 15 Maret 2023 Olah data untuk rekap transaksi berfaktur

39	16 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Input barang datang kain ke program Olah data untuk rekap transaksi gunggungan
40	17 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Olah data untuk rekap transaksi gunggungan Terima berkas dan arsip faktur masukan Maret
41	18 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Cetak nota gunggungan Membuat faktur penjualan Maret a. Pt harapan
42	20 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Terima berkas dan arsip faktur masukan Maret Cetak nota gunggungan
43	21 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Membuat faktur penjualan Maret Cetak nota gunggungan
44	22 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Cek final data work sheet spt tahunan WP OP untuk owner dan direktur Input barang datang dari gudang
45	23 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Terima berkas dan arsip faktur masukan Maret Cetak nota gunggungan
46	24 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Pembuatan surat PO remazol blue knr ori

		Melakukan permintaan enofa (nomor efaktur) pada laman https://efaktur.pajak.go.id Menerima berkas SPT Tahunan tahun 2022 telah dilaporkan konsultan pajak
47	25 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Input barang datang dari gudang Olah data untuk rekap transaksi gunggungan
48	27 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Membuat faktur penjualan atas penjualan bulan Maret pada efaktur
49	28 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke gudang Membuat faktur penjualan atas penjualan bulan Maret pada efaktur Kirim berkas faktur penjualan ke customer Pengajuan perhitungan kurang bayar PPN bulan Februari Pembuatan E-billing PPN Masa Februari
50	29 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke Gudang Input barang datang dari Gudang Pembuatan Surat PO Rekap Faktur Penjualan Maret
51	30 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke Gudang Melaporkan PPN Masa Februari 2023 Mengarsip SPT PPN Masa Februari
52	31 Maret 2023	Cek stock barang & melakukan permintaan barang ke Gudang Input barang datang dari Gudang



DAFTAR HADIR MAHASISWA STIE SURAKARTA
KEGIATAN KULIAH KERJA USAHA (KKU)

Periode

Nama Mahasiswa : Rizka Ummu Fadhillah
NIM : 20220071
Pembimbing : Arif Farida, S.E., M.Ak.
No. Telp Pembimbing : 089 678090385
Nama Instansi : CV Dima Gunungwatu Textile
Alamat Instansi : Jl. Madiyarto No. 23 RT 03 RW 08, SONDAKAN, LAWESAN
Nama Pimpinan : ADITYA SANTOSO Gunungwatu S.E.
No. Telp Pimpinan : 089524423054

FEBRUARI 2023																											
RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
✓	✓	✓	✓	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	✓	✓

MARET 2023																														
RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
✓	✓	✓	✓	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR	✓	✓	✓	✓	✓	

APRIL 2023																													
SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
						LIBUR															LIBUR								

Surakarta, 31 Maret 2023
Pimpinan/Ketua/Kepala Instansi

(BENAR - O
501

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan





SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA (STIE SURAKARTA)

Jl. Slamet Riyadi No.473, Makamhaji Telp. (0271) 717785, Fax. (0271) 724810
www.stiesurakarta.ac.id

KARTU BIMBINGAN KULIAH KERJA USAHA

Nama : Rizka Ummu Fadhillah
NIM : 20220071
Semester : 6

Program Studi : S1 Akuntansi
Strata/Jenjang : S1
Angkatan : 2020

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	JENIS BIMBINGAN	JUDUL BIMBINGAN	ISI BIMBINGAN	TANGGAPAN DOSEN PA	STATUS
1	28 February 2023	PENDAHULUAN	Penentuan masalah yang akan diangkat dalam laporan KKU	Dengan mengangkat 2 topik masalah faktur dan retur penjualan yang terjadi selama KKU, mendapatkan saran dari pembimbing, sebagai berikut : 1. memberikan pengarahan kepada customer untuk pembelian mereka akan dibuatkan faktur atas perusahaan sudah sebagai PKP dan bekerja sama dengan KPP untuk memberikan sosialisasi wawasan kepada pelaku usaha UMKM (Customer perusahaan) rata-rata customer adalah UMKM / usaha rumahan 2. Dengan kasus retur owner mengambil keputusan secara singkat dan cepat tanpa memikirkan efek jangka panjang, disini dapat diceritakan apa latar belakang pemilik dan customer tidak mau ribet dengan mengesampingkan tentang perpajakan	Laporan Bimbingan Anda Disetujui Oleh Dosen Pembimbing.	Selesai

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	JENIS BIMBINGAN	JUDUL BIMBINGAN	ISI BIMBINGAN	TANGGAPAN DOSEN PA	STATUS
2	6 April 2023	ISI	Pengumpulan Hardfile Laporan KKU	Pengumpulan Hardfile Laporan KKU, dengan terdapat revisi pada bagian Pembahasan atas saran dari Dosen Pembimbing untuk menambahkan perusahaan membuat database atau program perekam data customer untuk mempermudah staff saat membuat faktur penjualan untuk kedepannya dengan customer yang telah memberikan data NPWP atau NIK, sehingga saat melakukan transaksi tidak kembali meminta data diri NIK atau KTP pihak customer	mohon revisi2 tersebut dipelajari ya, jika memang ada argumen untuk bagian tertentu yang saya minta revisi maka bisa disampaikan dgn note atau dengan bimbingan offline.	Selesai
3	6 April 2023	PENUTUP	Pengumpulan Hardfile Laporan KKU	Pemeriksaan kembali laporan KKU oleh Dosen Pembimbing dari bab Permasalahan hingga solusi yang diberikan oleh penulis.	masih ada revisi namun dapat dilanjutkan menjadi laporan KKU	Selesai

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	JENIS BIMBINGAN	JUDUL BIMBINGAN	ISI BIMBINGAN	TANGGAPAN DOSEN PA	STATUS
4	6 April 2023	ACC	Pengesahan Laporan KKU dan Pengajuan Tanda Tangan	Judul : KEPATUHAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM PENJUALAN UNTUK PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA CV. BIMA GUNAWAN TEXTILE Permasalahan : 1. Penjualan yang dikenakan atau dibuatkan faktur penjualan oleh perusahaan mendapati kendala pada customer tidak berkenan memberikan identitas diri atas NPWP dan NIK sebagai isian data profil pada faktur 2. Transaksi atas retur penjualan dari customer yang dilakukan dalam tempo bebas Solusi : - Dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwasanya perusahaan telah ditetapkan sebagai PKP dengan mengharuskan perusahaan melakukan pemungutan PPN dengan menerbitkan faktur pajak untuk customer dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. - Memberikan informasi bahwasanya NIK berlaku sebagai sepadan dengan NPWP dengan ini memudahkan customer dalam bertransaksi, bahwa Nomor NIK pada KTP untuk penduduk warga negara telah memiliki atas kartu ini, dengan artian bahwa customer tidak ada upaya untuk tidak berkenan, jika atas alasan tidak berkenan dibuatkan faktur karena tidak memiliki kartu NPWP - Perusahaan memberikan ketentuan dan peraturan mengenai transaksi retur penjualan mengenai jangka waktu dan ketentuan pengembalian retur barang yang dapat diajukan customer - Melakukan revisi faktur sesuai saat terjadi transaksi retur penjualan, sesuai peraturan masa faktur dapat diakui 3 bulan berikutnya setelah transaksi masa faktur ACC : Laporan KKU telah acc dosen pembimbing oleh Ibu Farida pada tanggal 14 Maret 2023	mbak untuk nama perusahaan dapat di keep atau disamarkan jika memang perusahaan tidak berkenan untuk dimunculkan perusahaannya namun mbak perlu membuat surat pernyataan bematerai bahwa nama nama samaran tersebut adalah CV. BIMA Gunawan textile. sebagai jaga2 aja jika dikemudian hari ada dipertanyakan terkait nama samaran perusahaan tersebut. kenapa disamarkan? karena ini membahas ttng pajak takutnya iini rahasia perusahaan.	Selesai